

DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 - http://www.wantannas.go.id Telepon (021) 3451066, Faksimile (021) 3451066

PENGUMUMAN

NOMOR: 81 /KP.02.05/XI/2024

TENTANG

SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Setjen Wantannas RI) sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PD-14007000001 tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Setjen Wantannas RI dengan dasar hukum, ketentuan, syarat, tahapan, mekanisme, dan jadwal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835).

B. KETENTUAN UMUM

1. Jabatan yang akan diisi melalui seleksi terbuka adalah sebagai berikut:

NO.	JABATAN	UNIT KERJA	ESELON
1).	Staf Ahli Ilmu Pengetahuan	Staf Ahli	I.b
	dan Teknologi		

2. Ikhtisar jabatan tersebut adalah melaksanakan telaahan mengenai masalah IPTEK dan memberikan saran serta pertimbangan termasuk rekomendasi yang tidak menjadi tugas Deputi, Pembantu Deputi serta Analis Kebijakan berkaitan dengan masalah IPTEK kepada Sesjen Wantannas dalam merumuskan Konsep Kebijakan Strategis Bidang IPTEK dalam rangka pembinaan Ketahanan Nasional.

3. Persyaratan Umum

Persyaratan bagi Calon Pelamar dari Kalangan PNS

- a. Berstatus PNS;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c;
- d. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Pascasarjana (S-2), diutamakan berijazah Doktoral (S-3);
- e. Pernah/sedang menjabat jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan fungsional ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
- f. Telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau yang disetarakan, diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I atau yang disetarakan;
- g. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang IPTEK atau yang terkait secara kumulatif paling singkat 7 (tujuh) tahun;
- h. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- j. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
- k. Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun, 0 (nol) bulan, 0 (nol) hari pada saat tanggal pelantikan;
- 1. Bebas penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- m. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara/tidak sedang menjalani proses peradilan pidana dan/atau tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun

- waktu 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- n. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik dan/atau organisasi masyarakat yang dilarang pemerintah;
- o. Mendapat rekomendasi/persetujuan tertulis mengikuti seleksi terbuka dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- p. Berkomitmen untuk menandatangani Pakta Integritas;
- q. Telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Tahun 2023;
- r. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023;
- s. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan bermaterai Rp 10.000,- yang ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun 2024.

Persyaratan bagi Calon Pelamar dari Kalangan Prajurit TNI dan Anggota POLRI

- a. Berstatus Prajurit TNI atau Anggota POLRI:
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Sekurang-kurangnya berpangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama dari pelamar yang berlatar TNI dan Brigadir Jenderal Polisi dari pelamar yang berlatar POLRI selama minimal 2 (dua) tahun;
- d. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Pascasarjana (S-2), diutamakan berijazah Doktoral (S-3);
- e. Pernah/sedang menjabat jabatan pimpinan tinggi pratama paling singkat 2 (dua) tahun;
- f. Telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau yang disetarakan, diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I atau yang disetarakan;
- g. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang IPTEK atau yang terkait secara kumulatif paling singkat 7 (tujuh) tahun;
- h. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- j. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
- k. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, 0 (nol) bulan, 0 (nol) hari pada saat tanggal pelantikan;

- 1. Bebas penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- m. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara/tidak sedang menjalani proses peradilan pidana dan/atau tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- n. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik dan/atau organisasi masyarakat yang dilarang pemerintah;
- o. Mendapat rekomendasi/persetujuan tertulis mengikuti seleksi terbuka dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan Panglima TNI/Kepala POLRI;
- p. Berkomitmen untuk menandatangani Pakta Integritas;
- q. Telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Tahun 2023;
- r. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023;
- s. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan bermaterai Rp 10.000,- yang ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun 2024.

C. TAHAPAN DAN MEKANISME

- 1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui <u>www.wantannas.go.id</u> mulai tanggal 28 November s.d. 3 Desember 2024.
- 2. Pendaftar melakukan pendaftaran secara *online* melalui <u>www.wantannas.go.id</u> dengan mengunggah (*upload*) scan dokumen (berwarna) persyaratan yang terdiri dari:
 - a. Surat Lamaran ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia, diketik menggunakan komputer, dibubuhi materai Rp10.000,- dan ditandatangani (dibuat sesuai format pada lampiran I);
 - b. Daftar Riwayat Hidup (sesuai format pada lampiran II);
 - c. Kartu KTP, Kartu NPWP, dan Kartu Pegawai yang dilegalisasi;
 - d. Fotokopi Ijazah pendidikan dan transkrip nilai yang disyaratkan dan dilegalisasi;
 - e. Fotokopi Surat Keputusan kepangkatan terakhir yang dilegalisasi;

- f. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan terakhir dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II)/Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Utama yang pernah/sedang diduduki yang dilegalisasi;
- g. Fotokopi Sertifikat Diklat Kepemimpinan terakhir dan/atau Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional yang setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilegalisasi;
- h. Fotokopi Sertifikat Diklat Teknis maupun fungsional yang relevan dengan jabatan yang dilamar (jika ada) yang dilegalisasi;
- i. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja tahun 2022 dan tahun 2023 lengkap dengan Sasaran Kinerja Pegawai dalam 1 file yang dilegalisasi;
- j. Tanda bukti penyerahan SPT Pajak tahun 2023 dan Tanda Bukti penyerahan LHKPN tahun 2023;
- k. Surat Pernyataan Pelamar yang menyatakan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/ anggota partai politik dan/atau organisasi masyarakat yang dilarang pemerintah dan ditandatangani di atas materai Rp. 10.000- (sesuai format pada lampiran III);
- 1. Bagi pelamar dari kalangan PNS, Surat Persetujuan mengikuti rangkaian seleksi terbuka pengisian JPT Madya di lingkungan Setjen Wantannas RI dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- atau dengan tanda tangan elektronik tanpa materai (sesuai format pada lampiran IV);
- m. Bagi pelamar dari kalangan Prajurit TNI/Anggota POLRI, Surat rekomendasi/persetujuan tertulis mengikuti rangkaian seleksi terbuka pengisian JPT Madya di lingkungan Setjen Wantannas RI dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induk, yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- atau dengan tanda tangan elektronik tanpa materai (sesuai format pada lampiran IV);
- n. Surat pernyataan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan pelamar tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara/tidak sedang menjalani proses peradilan pidana dan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan ditandatangani di atas materai Rp. 10.000- (sesuai format pada lampiran V);
- o. Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dari lembaga/instansi yang mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan NAPZA;
- p. Menandatangani Pakta Integritas (sesuai contoh lampiran VI); dan
- q. Pasfoto terbaru dengan latar belakang berwarna merah ukuran 4x6;

D. JADWAL TAHAPAN SELEKSI

NO	TAHAPAN/KEGIATAN	TANGGAL/WAKTU
1	Pengumuman	28 November 2024
2	Pendaftaran dan Penerimaan berkas administrasi (via <i>online</i>)	28 November – 3 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	28 November – 3 Desember 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 Desember 2024
5	Tes Kompetensi, Pembuatan Makalah, Wawancara dan Penelusuran Rekam Jejak Calon	5 - 6 Desember 2024
6	Pengumuman Hasil Seleksi Tes Kompetensi, Pembuatan Makalah, Wawancara dan Penelusuran Rekam Jejak Calon	8 Desember 2024
7	Assesment	9 – 10 Desember 2024
8	Pemeriksaan Kesehatan	16 Desember 2024
9	Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka 3 besar	16 Januari 2025
10	Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka	21 Januari 2025

Keterangan: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diumumkan melalui laman <u>www.wantannas.go.id</u>.

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
- 2. Berkas pendukung lamaran (lampiran I s.d. VI) diketik menggunakan program MS Word atau excel dan dapat diunduh/download melalui laman resmi Setjen Wantannas : www.wantannas.go.id;
- 3. Bagi Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, harus membawa seluruh berkas persyaratan administrasi yang asli pada saat tahapan Seleksi Kompetensi untuk dilakukan verifikasi berkas asli;
- 4. Setiap informasi penting terkait proses seleksi akan diumumkan melalui laman resmi Setjen Wantannas: www.wantannas.go.id;

- 5. Bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, berkas lamaran tidak dikembalikan dan menjadi arsip Panitia Seleksi;
- 6. Peserta tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan Panitia Seleksi;
- 7. Seluruh biaya pribadi (akomodasi, transportasi, pemenuhan kelengkapan administrasi) selama pelaksanaan/proses seleksi ditanggung oleh peserta;
- Apabila di kemudian hari ditemukan peserta calon pejabat yang memberikan data/keterangan yang tidak benar, maka Panitia Seleksi berhak menggugurkan peserta dan dapat membatalkan hasil seleksi;
- 9. Keseluruhan tahapan seleksi tidak dipungut biaya;
- 10. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat; dan
- 11. Panitia Seleksi Terbuka tidak bertanggung jawab atas berita, informasi, dan pengumuman yang disebarluaskan tanpa melalui laman resmi Setjen Wantannas. Apabila membutuhkan informasi dan penjelasan teknis administratif, dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka melalui telepon di 021-3451067 atau e-mail: pansel@wantannas.go.id.

Jakarta, 20 November 2024

Deputi Bidang Sistem Nasional Selaku Ketua Panitia Seleksi Terbuka

atan Rimpinan Tinggi Madya,

Yuniarto S.AP., M.Si., M.Tr (Han)

Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

- 1. Menteri PAN dan RB RI;
- 2. Kepala BKN RI;
- 3. Sesjen Wantannas RI (sebagai laporan).